

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN
DANA DESA DI DESA BUTUNGALE KECAMATAN
POPAYATO BARAT KABUPATEN POHuwATO**

Oleh

**FADLUN TULI
E2119174**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
GORONTALO
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUTUNGALE KECAMATAN POPAYATO BARAT KABUPATEN POHuwATO

Oleh

**FADLUN TULI
E2119174**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 21 Oktober 2023**

PEMBIMBING I



**TAMSIR, SE., MM
NIDN :0920057403**

PEMBIMBING II



**NG SYAMSIAH, B, SE., MM
NIDN : 0921018003**

HALAMAN PERSETUJUAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUTUNGALE KECAMATAN POPAYATO BARAT KABUPATEN POHuwATO

Oleh

FADLUN TULI
E2119174

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Sulaiman, SE., MM : 
2. Sulerski Monoarfa, S.Pd., M.Si : 
3. Sri Dayani Ismail, SE., MM : 
4. Tamsir, SE., MM : 
5. Ng Syamsiah. B, SE., MM : 

Mengetahui :



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon".

Kupersembahkan sebagai tanda baktiku kepada kedua Orang Tuaku, Saudara-saudaraku, serta Teman-teman sekalian, yang telah memberikan dukungan serta do'a hingga karya ilmiah ini dapat terselsaikan.

Special Buat:

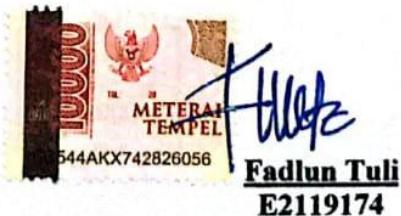
**ALMAMATERKU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 07 September 2023
Yang Membuat Pernyataan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato”. sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: penulis menyampaikan terima kasih kepada :

- Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIPT-IG).
- Bapak Dr. H. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
- Bapak Dr. Musafir, SE, M.Si selaku Dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo.
- Bapak Syamsul, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo.

- Bapak Tamsir, SE., MM selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini.
- Ibu Ng Syamsiah. B, SE., MM, selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini.
- Bapak Sam'un Yalang, SP, selaku Kepala Desa Butungale, yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan.
- Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
- Ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku dan keluarga yang telah membantu/mendukung penulis selama penyusunan usulan peneltian ini.
- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan usulan peneltian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini jauh dari sempurna, jika terdapat kelebihan dalam Skripsi ini, maka semua datangnya dari Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, Juli 2023

(**Penulis**)

ABSTRACT

FADLUN TULI. E2119174. FACTORS AFFECTING VILLAGE FUND MANAGEMENT IN BUTUNGALE VILLAGE, WEST POPAYATO SUBDISTRICT, POHUVATO DISTRICT.

Village fund management is an activity that includes planning, implementation, administration, reporting, accountability, and guidance and supervision of Village Funds. This research aims to find and analyze the effect of the internal control system on Village Fund Management in BUTUNGALE Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District. Based on the data processing results using SPSS-16, a t-count value of 2.056 can be obtained (t-count 8.418 > t-table 2.056). It means that the Official Competence variable (X1) has a positive and significant effect on Village Fund Management (Y) in Butungale Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District, and by a significant value of 0.000, which is smaller than the significance level used, namely 0.05 or 5% ($0.000 < 0.05$). The t-count value of -0.664 is smaller when compared to the t-table value of 2.056 (t-count -0.664 > t-table 2.056) with a significant value of $0.035 < 0.05$ or 5% ($0.035 < 0.05$) which means that the Community Participation variable (X2) does not affect Village Fund Management (Y) in Butungale Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District. The t-count value of 0.541 is smaller than the t-table value of 2.056 (t-count 0.541 < t-table 2.056). It means that the Reporting Compliance variable (X3) has a positive but not significant effect on Village Fund Management (Y) in Butungale Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District. Likewise, a significance value of 0.593 is obtained greater than the significance level used, namely 0.05 or 5% ($0.593 > 0.05$). Meanwhile, the F-count is $24,420 > F$ -table is 2.975, with the probability of an Fcount error occurring smaller than the specified error level (α) of $0.000 < 0.005$. Thus, the variables of Official Competence (X1), Community Participation (X2), and Reporting Compliance (X3) simultaneously have a positive and significant effect on Village Fund Management (Y) in Butungale Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District

Keywords: official competence, community participation, reporting compliance, village fund management

ABSTRAK

FADLUN TULI. E2119174. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUTUNGALE KECAMATAN POPAYATO BARAT KABUPATEN POHUWATO.

Pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan serta pengawasan Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh sistem pengendalian internal Pengelolaan Dana Desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato. Dari hasil olahan data, dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh nilai t hitung sebesar 2,056 (t hitung $8,418 > t$ tabel 2,056). Yang berarti bahwa variabel Kompetensi Aparat (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato dan didukung dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% ($0,000 < 0,05$). Nilai t hitung sebesar -0,664 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,056 (t hitung $-0,664 > t$ tabel 2,056) dengan nilai signifikan $0,035 < 0,05$ atau 5% ($0,035 < 0,05$) yang berarti bahwa variable Partisipasi Masyarakat (X2) tidak mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Nilai t hitung sebesar 0,541 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,056 (t hitung $0,541 < t$ tabel 2,056). Yang berarti bahwa variable Ketaatan Pelaporan (X3) berpengaruh positif dan namun tidak signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Demikian pula halnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,593 yang lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% ($0,593 > 0,05$). Sedangkan F hitung sebesar $24,420 > F$ tabel sebesar 2,975 dengan probabilitas terjadinya kesalahan F hitung lebih kecil dari taraf (α) kesalahan yang ditentukan $0,000 < 0,005$. Dengan demikian variabel Kompetensi Aparat (X1), Partisipasi Masyarakat (X2) dan Ketaatan Pelaporan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

Kata kunci: kompetensi aparat, partisipasi masyarakat, ketaatan pelaporan, pengelolaan dana desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.3.1. Maksud Penelitian.....	4
	6
	6

1.3.2. Tujuan Penelitian	
1.4 Manfaat Penelitian.....	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1.Desa	7
2.1.1. Pengertian Desa	7
2.1.2. Pemerintah Desa	8
2.1.3. Otonomi Desa	9
2.2. Pengelolaan Dana Desa	12
2.2.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa	12
2.2.2. Asas Pengelolaan Dana Desa	20
2.2.3. Inikator Pengelolaan Dana Desa	22
2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeloaan Dana Desa	23
2.3.1. Kompetensi Aparat	23
2.3.2. Partisipasi Masyarakat	24
2.3.3. Ketaatan Pelaporan	25
2.4. Kerangka Pikir	27
2.5. Hipotesis	28
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	29
3.1. Objek Penelitian.....	30
3.2. Metode Penelitian	30
3.2.1. Desain Penelitian	30
	31
	32
	33

3.2.2. Operasional Variabel Penelitian	
3.2.3. Populasi dan Sampel	
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data	
3.2.5. Metode Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.2. Hasil Penelitian dan Analisis Deskriptif	38
4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi Aparat (X_1)	39
4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Partisipasi Masyarakat (X_2)	41
4.2.3. Analisis Deskriptif Variabel Ketaatan Pelaporan (X_3)	44
4.2.4. Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y)	45
4.3. Pengujian Hipotesis	47
4.3.1. Analisis Reresi Berganda	47
4.3.2. Uji Parsial (Uji t)	49
4.3.3. Uji Statistik F (Uji Simultan)	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1. Kesimpulanan	53
5.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir	28
Gambar 4.1. Struktur Perangkat Desa	37

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Operasional Variabel Penelitian	31
Tabel 4.1. Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden	38
Tabel 4.2. Tanggapan Responden Variabel Kompetensi Aparat Item 1-3 ...	39
Tabel 4.3. Tanggapan Responden Variabel Kompetensi Aparat Item 4-6 ...	40
Tabel 4.4. Tanggapan Responden Variabel Partisiapsi Masyarakat Item 1-3 ..	41
Tabel 4.5. Tanggapan Responden Variabel Partisiapsi Masyarakat Item 4-6 ..	42
Tabel 4.6. Tanggapan Responden Variabel Ketaatan Pelaporan Item 1-4	44
Tabel 4.7. Tanggapan Responden Variabel Ketaatan Pelaporan Item 1-2	45
Tabel 4.8. Tanggapan Responden Variabel Ketaatan Pelaporan Item 3-5	46
Tabel 4.9. Analisis Regresi Sederhana	48
Tabel 4.10. Model Summary	49
Tabel 4.11. Uji t	50
Tabel 4.11. Uji F	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Penelitian	58
Lampiran 2. Kuisioner Penelitian	59
Lampiran 3. Tabulasi Data	63
Lampiran 4. Output SPSS-16	67
Lampiran 5. Surat Rekomendasi Penelitian	68
Lampiran 6. Surat Balasan Penelitian	69
Lampiran 7. Surat Bebas Plagiasi	70
Lampiran 8. Hasil Turnitin	71
Lampiran 9. Curriculum Vitae	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang "Pemerintah Daerah" dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah yang kemudian keduanya disempurnakan menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004. Menurut UU No 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses penyerahan kewenangan tersebut memang sudah sepatutnya menjadi titik awal kebangkitan desa sebagai sebuah pemerintah daerah. Dimana desa diberikan kepuhan mutlak untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahannya sendiri tanpa

intervensi dari pihak manapun, tentunya dengan mengandalkan sumber daya manusia yang ada di desa sebagai subjek pelaksana pembangunan. Pelimpahan kewenangan kepada desa tersebut dapat menjadikan instrumen dan solusi yang tepat untuk mewujudkan akselerasi pembangunan di desa. Atas dasar pertimbangan itulah, maka untuk menunjukkan eksistensi desa sebagai bagian dari pemerintahan langkah awalnya dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Pemberian ADD kepada desa karena didasari oleh beberapa kendala yang dihadapi desa, yang sebagian besar desa mengalami keterbatasan dalam keuangan desa, sehingga Program ADD adalah terobosan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu.

Ada empat faktor utama yang menyebabkan lahirnya ADD, yaitu: (1) desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula; (2) Kesejahteraan masyarakat desa rendah; (3) Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan; dan (4) Banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

ADD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang

dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah kebijakan yang baru.

Berdasarkan evaluasi penyaluran dana dan penggunaan dana desa tahun 2016 secara umum diantaranya penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa, kelebihan pembayaran, pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai, dana disimpan bukan di RKD, dan pengeluaran di luar APBDesa. Hasil evaluasi tersebut mengindikasikan masih adanya permasalahan dan kurang akuntabelnya laporan keuangan dana desa. Inilah yang justru menimbulkan isu, karena di lain sisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian Desa PDTT. Diduga terjadi kasus penyuapan oleh Kementerian Desa PDTT terhadap pejabat BPK RI. Beralih dari kasus yang terjadi di pemerintah pusat, berbagai masalah alokasi dana desa tersebut juga hampir dialami oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Permasalahan yang terjadi di Desa Butungale di antaranya masih banyaknya perangkat desa yang belum memahami regulasi dan aturan terkait dana desa. Sebagian besar perangkat desa hanya menjalankan perintah dengan sistem yang sudah ada, demikian terjadi karena tingkat pendidikan yang masih rendah serta minimnya pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah daerah. Selain itu, partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan dana desa masih sebatas formalitas karena dalam pelaksanaan masyarakat tidak benar-benar diberi kesempatan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Dalam hal ketaatan pelaporan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga mempengaruhi pengelolaan dana desa itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul :

“Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi aparat berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
3. Apakah ketaatan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

4. Apakah kompetensi aparat, partisipasi masyarakat dan ketaatan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data mengenai kompetensi aparat, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan ketaatan pelaporan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : Pengaruh kompetensi aparat, partisipasi masyarakat dan ketaatan pelaporan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi penelitian-penelitian berikutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya yang terkhusus dalam bidang manajemen keuangan, terutama dalam hal pengaruh

kompetensi aparat, partisipasi masyarakat dan ketaatan pelaporan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

2. Manfaat Praktisi :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Kepala Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

3. Manfaat Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang teori-teori ilmu manajemen, serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku kuliah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Desa

2.1.1. Pengertian Desa

Menurut Yuliati (2003:24) kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Datu di Maluku, Nagari di Minang, Wanua di Minahasa dan Nagori di Simalungun sendiri. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (2007:286), pengertian desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang

agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampong, dusun, (3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah.

2.1.2. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa,

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah pemimpin atau penguasa di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa ataupembantu desa. Dalam mewakili masyarakat desa untuk hubungan yang sifatnya keluar atau ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.1.3. Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Widjaja (2003: 3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *Pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencarian masyarakat.

Selanjutnya Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang

ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (Widjaja, 2003:166).

2.2. Pengelolaan Dana Desa

2.2.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan: Dana Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber Dana Desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai oleh APBN.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa: Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Dana Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan. Nurcholis (2011: 82) berpendapat bahwa pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang dibagi ke setiap desa secara proposisional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk semua kegiatan yang telah dilakukan.

a. Perencanaan.

Sujarweni Wiratna (2015: 18) menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mekanisme Perencanaan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah rencana yang disusun untuk menjamin konsistensi dalam melaksanakan pembangunan agar nantinya sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening desa. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Herlianto (2017: 12) menjelaskan bahwa: Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan, yaitu:

1. Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan
2. pemerintah desa yang dibantu oleh Dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
3. Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
4. Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
5. Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci.

c. Penatausahaan

Herlianto (2017: 13) menjelaskan bahwa penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media piñata usahaan

berupaka buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara. Lapananda (2016: 55) menjelaskan bahwa: Penatausahaan Dana Desa ialah kegiatan mengatur Dana Desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keungan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan piñata usahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penata usahaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Penatausahaan penerimaan dan menggunakan:
 - Buku kas umum
 - Buku Kas Pembantu Pajak dan
 - Buku Bank.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penata usahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

d. Pelaporan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

1. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi ABDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan danb. Laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah penyampaian pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

e. Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pertanggung jawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a) Format Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan
 - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBdesa, disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban untuk APBDesa dilaksanakan melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

f. Pengawasan

Menurut Herlianto (2017: 17) mengemukakan bahwa: Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil

sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Sujarweni (2015: 23) lebih lanjut menjelaskan bahwa:

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa meliputi pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota.

2.2.2. Asas Pengelolaan Dana Desa.

1. Transparan

Menurut Mahmudi (2011: 17-18) Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan

memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk.

- a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).
- b. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
- d. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas transparan dapat diartikan sebagai suatu keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses guna mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

2. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Sujarweni (2015:28) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) Merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Mardiasmo (2010 : 20) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan

segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor public berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain:

- a. hak untuk tahu (*right to know*),
- b. hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan
- c. hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik kesimpulannya bahwa, akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dalam pelaksanaan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Partisipatif

Menurut Sujarweni (2015:29) yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik

kesimpulan bahwa, partisipatif adalah keikutsertaan orang yang bersangkutan yang mempunyai hak dalam pengambilan bagian setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mendapatkan keputusan.

2.2.3. Indikator Pengelolaan Dana Desa.

Indikator Pengelolaan Dana Desa menurut Mada dkk (2017:109) adalah sebagai berikut :

- a. Kejujuran dan keterbukaan informasi
- b. Kepatuhan dalam pelaporan
- c. Kesesuaian prosedur
- d. Kecukupan informasi
- e. Ketepatan penyampaian laporan

2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa

2.3.1. Kompetensi Aparat

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004).

Ketika principal memberikan amanah kepada agent dalam wewenang atas tanggungjawab sebagai bentuk pertanggung jawabkan segala aktivitas yang dilakukan dan dipertanggung jawabkan kepihak principal sebagai pihak yang berwenang. Jika

perangkat desa itu paham atas akuntabilitas pengelolaan dana desa maka tidak akan terjadi penyelewengan anggaran oleh kepala desa maupun perangkat desa itu sendiri. Sehingga semakin tinggi kompetensi aparatur desa, akan semakin tinggi pula pemahamannya terhadap pengelolaan dana desa, dengan demikian pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel. Jadi, dengan kata lain pemahaman perangkat desa yang baik maka dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa akan baik juga.

Indikator kompetensi Aparat menurut Mada dkk (2017:109) adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan
- b. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan
- c. Keahlian teknis
- d. Kemampuan mencari solusi
- e. Inisiatif dan bekerja
- f. Keramahan dan kesopanan.

2.3.2. Partisipasi Masyarakat

Juliantara (2002:87) menyatakan substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan.

Menurut Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2003:309) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai mekanisme

dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan (Ibrahim, 2003:818). Seperti di Los Angeles, partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika dikaitkan dengan teori agensi, bahwa rakyat adalah principal sedangkan pemerintah desa adalah agen. Maka pemerintah desa sudah semestinya mengutamakan kepentingan rakyat dengan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan hingga mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan desa kepada rakyat.

Dengan demikian pengelolaan dana desa yang akuntabel adalah salah satu indikator responsibilitas pemerintah desa terhadap rakyat. Akuntabilitas dipengaruhi tingkat partisipasi rakyat, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka akan semakin akuntabel pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat akan mempengaruhi pengambilan keputusan pada pemerintahan desa, oleh karena itu ada pengaruh positif antara peran masyarakat terhadap akuntabilitas alokasi dana desa.

Indikator partisipasi masyarakat menurut Mada dkk (2017:109) adalah sebagai berikut :

- a. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan program desa
 - a. Mengusulkan rencana anggaran
 - b. Terlibat dalam rapat paripurna
 - c. Terlibat mengawasi dan melaporkan
 - d. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran
 - e. Memberikan penghargaan

2.3.3. Ketaatan Pelaporan

Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir, 1996). Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran.

Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi, gambaran kinerja perusahaan selama satu periode kepada pengambil keputusan, 31 dan sebagai gambaran bagaimana kondisi keuangan organisasi atau perusahaan tersebut.

Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 mengatur mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif & tertib, dan disiplin anggaran. Akuntabel dalam hal konteks ini didefinisikan sebagai pertanggungjawaban secara moral, teknis, hukum, dan administratif. Pengelolaan keuangan pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif sejak fase

perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan (parsitipatif). Selanjutnya, tertib dan disiplin anggaran yang tercermin dari konsistensi, tepat waktu, tepat jumlah, dan taat asas. Sebagai agen yang bertanggungjawab tentunya pemerintah desa akan membuat laporan keuangan desa secara akuntabel, sebagai wujud tanggungjawab terhadap pemerintah, yang jauh lebih utama adalah tanggungjawab moral kepada rakyat. Hubungannya dengan akuntabilitas laporan keuangan dana desa, bahwa semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan desa yang akuntabel. Begitu sebaliknya, apabila aparatur desa tidak taat terhadap pelaporan keuangan maka laporan keuangan yang dihasilkan kurang akuntabel. Indikator ketaatan pelaporan menurut Mada dkk (2017:109) adalah sebagai berikut :

- a. Transparasi
- b. Akuntabel
- c. Partisipatif
- d. Tetib administrasi dan peraturan

2.4. Kerangka Pikir

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa: Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka Pengelolaan Dana Desa

menurut Mada dkk (2017:109) dapat diperhatikan hal-hal yang meliputi : (a) kejujuran dan keterbukaan informasi , (b) kepatuhan dalam pelaporan, (c) kesesuaian prosedur, (d) kecukupan informasi dan (e) ketepatan penyampaian laporan

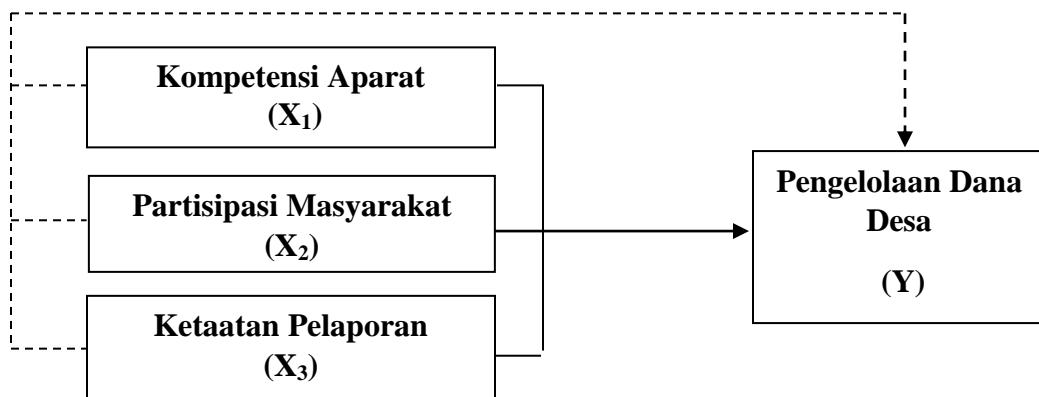
Frink dan Klimoski, (2004) menjelaskan bahwa, kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi yang meliputi : (a) Pengetahuan, (b) Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan, (c) Keahlian teknis, (d) Kemampuan mencari solusi, (e) Inisiatif dan bekerja dan (f) Keramahan dan kesopanan.

Menurut Juliantara (2002:87) menyatakan substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan yang terdiri dari : (a) Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan program desa, (b) Mengusulkan rencana anggaran, (c) Terlibat dalam rapat paripurna, (d) Terlibat mengawasi dan melaporkan, (e) Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran dan (f) Memberikan penghargaan.

Sedangkan Ketaatan menurut Mudhafir (1996) adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar, hal ini terdiri dari : (a) Transparasi, (b) Akuntabel, (c) Partisipatif dan (d) Tetib administrasi dan peraturan.

Berdasarkan kajian teori di atas maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

Gambar Kerangka Pikir



2.5. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka pikir maka hipotesis penelitian ini adalah

5. Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.
6. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif secara parsial terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.
7. Ketaatan pelaporan berpengaruh positif secara parsial terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

8. Kompetensi aparat, partisipasi masyarakat dan ketaatan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

BAB III

OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah pengaruh kompetensi aparat, partisipasi masyarakat dan ketaatan pelaporan serta pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

3.2. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:2) pengertian metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada giliranya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggunakan statistika untuk mendeskripsikan atau menggabarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:147).

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random atau acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun metode penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan dan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif.

Menurut Sugiono (2009:11) Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

3.2.2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel penelitian terbagi dua yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X).

1. Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:97). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa (Y).
2. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2014:96).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi aparat (X_1), partisipasi masyarakat (X_2) dan ketaatan pelaporan (X_3).

Tabel 3.1
Tabel Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator-Indikator	Skala
Kompetensi aparat (X_1)	1. Pengetahuan 2. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan 3. Keahlian teknis 4. Kemampuan mencari solusi 5. Inisiatif dalam bekerja 6. Keramahan dan kesopanan.	Ordinal
Partisipasi masyarakat (X_2)	1. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan program desa 2. Mengusulkan rencana anggaran 3. Terlibat dalam rapat paripurna 4. Terlibat mengawasi dan melaporkan 5. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran 6. Memberikan penghargaan	Ordinal
Ketaatan pelaporan (X_3)	1. Transparasi 2. Akuntabel 3. Partisipatif 4. Tetib administrasi dan peraturan	Ordinal
Pengelolaan	1. Kejujuran dan keterbukaan informasi	Ordinal

Dana Desa (Y)	2. Kepatuhan dalam pelaporan 3. Kesesuaian prosedur 4. Kecukupan informasi 5. Ketepatan penyampaian laporan	
------------------	--	--

Sumber : Mada dkk (2017).

3.2.3. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa 1 orang, BPD 5 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Bendahara 1 orang, Kepala urusan Tata Usaha 1 orang, Kepala Urusan Perencanaan 1 orang, Kepala urusan Pemerintahan 1 orang, Kepala Seksi Kesejahteraan 1 orang, dan Kepala Seksi Pelayanan Desa 1 orang, Inspektorat Daerah 9 orang dan Aparat Kecamatan 8 orang sehingga total responden sebanyak 30 orang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh (sensus). Menurut Sugiyono (2014:44) *sampling* jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi kecil dan relatif heterogen.

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2014:61) merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini, maka teknik yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library research bertujuan untuk mengumpulkan referensi-referensi baik itu dalam bentuk buku, majalah, jurnal maupun buletin-buletin yang terkait dengan obyek yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field reserach bertujuan untuk mengumpulkan data-data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara :

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.
2. Kuisisioner, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur pengaruh kompetensi aparat, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan ketaatan pelaporan serta pengelolaan Dana Desa menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014:92). Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dalam penelitian ini dijabarkan menjadi sub variabel, yang kemudian dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator-indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupaya pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden.

3.2.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Regresi berganda

Untuk melihat pengaruh kompetensi aparat, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan ketaatan pelaporan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, maka peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat bentuk hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Menurut Sugiono (2014) persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

Dimana:

Y = Pengelolaan Dana Desa

a = Nilai Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien variabel

X₁ = Kompetensi Aparat

X₂ = Partisipasi Masyarakat

X₃ = Ketaatan Pelaporan

ϵ = Pengaruh Variabel Lain

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel sangat terbatas.

Menurut Ghazali (2016:97) nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan perbedaan antara nilai dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Apakah jumlah *degree of freedom* (df) adalah 2 atau lebih dan derajat kepercayaan 5%, maka H_0 dapat ditolak. Membandingkan nilai t table, kita menerima H_a yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. (Ghazali, 2016:98-99).

4. Uji Statistik F (Uji Simultan)

Menurut Ghazali (2016:98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (H_0)

yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. Apabila nilai F lebih besar maka H₀ dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Desa Butungale merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato yang memiliki tugas untuk mengurus segala kebijakan yang ada pada desa tersebut mulai dari pelayanan terhadap masyarakat, pengelolaan dana desa hingga sampai pada administrasi desa.

Dalam sejarah masyarakat Desa Butungale, desa diperkirakan dibuka ratusan tahun yang lalu pada masa sebelum kemerdekaan Gorontalo yang dibawah oleh 2 suku daerah. Yang pada saat itu daratan Butungale masih merupakan hutan rimba. Setelah perkembangannya seiring dengan perjuangan masyarakat Gorontalo terbebas dari masa penjajahan Belanda maka penduduk Butungale semakin bertambah.

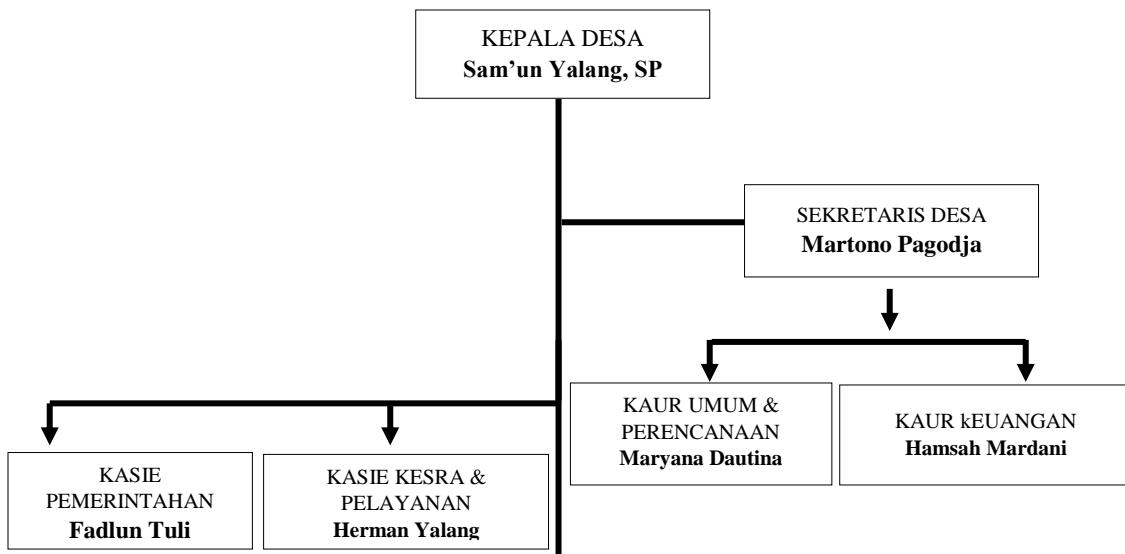
Desa Butungale sebelumnya adalah wilayah Dusun dari Dudewulo yang di diami oleh dua etnis suku Gorontalo dan suku Kaili, kedua suku tersebut menyepakati nama wilayah mereka Butungale Yang mempunyai dua makna yakni Butuh artinya mata air (Lobutuh) dari bahasa Gorontalo, dan Ngale artinya hutan dari bahasa Kaili, sehingga Butungale mempunyai makna Air yang keluar dari dalam hutan.

Dengan bergulirnya waktu hingga saat ini diukur kran pemekaran tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Dusun Butungale berinisiatif membentuk panitia pemekaran tepatnya pada tanggal 1 April 2008, mengingat jasa para pendahulu yang membuka mulanya wilayah Butungale. Panitia pemekaran yang terbentuk menyepakati nama Desa persiapan di kukuhkan Desa Persiapan Butungale. Alhamdulillah pada Juli 2008 harapan masyarakat menjadi Desa definitif terwujud.

Setelah definitifnya Desa Butungale, pelaksana tugas pemerintahan sementara yakni Bapak Zulkifli Buluawa, SE, sehingga terbentuknya panitia Pilkades yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa Butngale, Kepala Desa Butungale pertama Bapak Kismat Rusdin Wakiden dan ditetapkan pada tanggal 28 Nopember 2008 oleh Bapak Bupati Pohuwato yakni Bapak Zainuddin Hasan dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.

Adapun struktur pemerintah Desa Butungale adalah sebagai berikut:

Gambar
Struktur Perangkat Desa





4.2. Hasil Penelitian dan Analisis Deskriptif

Pada penelitian ini penulis membahas variabel X yang mempengaruhi variabel Y, dalam hal ini adalah variabel sistem pengendalian internal (X), sedangkan variabel terikat yaitu pengelolaan dana desa (Y). Skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasilnya adalah :

$$\text{Skor terendah} = \text{Bobot terendah} \times \text{Jumlah responden} = 1 \times 1 \times 30 = 30$$

$$\text{Skor tertinggi} = \text{Bobot tertinggi} \times \text{Jumlah responden} = 5 \times 1 \times 30 = 150$$

Dari hasil perhitungan rentang bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :

$$\text{Rentang Skala} = \frac{150 - 30}{5} = 24$$

Tabel 4.1.

Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden

Range	Kategori
130 – 154	Sangat Baik
105 – 129	Baik
80 – 104	Kurang Baik
55 – 79	Tidak Baik
30 – 54	Sangat Tidak Baik

4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi Aparat (X_1)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 6 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2. Tanggapan Responden
Variabel Kompetensi Aparat (X_1) pada Item 1-3**

Bobot	Tanggapan Responden								
	Item 1			Item 2			Item 3		
	Frek.	Skor	Persen	Frek.	Skor	Persen	Frek.	Skor	Persen
5	18	90	60	21	105	70	25	125	83
4	12	48	40	9	36	30	5	20	17
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	30	138	100	30	141	100	30	145	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel di atas dalam pernyataan pengetahuan akan siklus pengelolaan dana desa menunjang kemampuan dalam bekerja diperoleh tanggapan responden sebanyak 18 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju dengan skor 90, sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab setuju dengan skor 48, sehingga total skor item 1 adalah 138 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Untuk pernyataan tentang pelatihan terkait dengan penyusunan laporan kuangan berguna untuk mengembangkan kemampuan aparatur desa diperoleh tanggapan

responden sebanyak 21 responden atau 70% yang menjawab sangat setuju dengan skor 105, sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 36, sehingga total skor item 2 adalah 141 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Untuk pernyataan tentang keahlian teknis merupakan bagian yang angat menunjang dalam pengelolaan dana desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 25 responden atau 83% yang menjawab sangat setuju dengan skor 125, sebanyak 5 responden atau 17% yang menjawab setuju dengan skor 20, sehingga total skor item 3 adalah 145 dan masuk dalam kategori sangat baik.

**Tabel 4.3. Tanggapan Responden
Variabel Kompetensi Aparat (X₁) pada Item 4-6**

Bobot	Tanggapan Responden								
	Item 4			Item 5			Item 6		
	Frek.	Skor	Persen	Frek.	Skor	Persen	Frek.	Skor	Persen
5	27	135	90	22	110	73	23	115	77
4	3	12	10	8	32	27	7	28	23
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	30	147	100	30	142	100	30	143	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang kemampuan mencari solusi merupakan kompetensi yang akan menunjang pengelolaan keuangan desa yang lebih baik diperoleh tanggapan responden sebanyak 27 responden atau 90% yang menjawab sangat setuju dengan skor 135, sebanyak 3 responden atau 10% yang menjawab setuju dengan skor 12, sehingga total skor item 4 adalah 147 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Untuk pernyataan tentang inisiatif dalam mengelola keuangan desa harus dimiliki oleh setiap aparat diperoleh tanggapan responden sebanyak 22 responden atau 73% yang menjawab sangat setuju dengan skor 110, sebanyak 8 responden atau 27% yang menjawab setuju dengan skor 32, sehingga total skor item 5 adalah 142 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang pelayanan kepada masyarakat diberikan dengan penuh keramahan dan kesopanan diperoleh tanggapan responden sebanyak 23 responden atau 77% yang menjawab sangat setuju dengan skor 115, sebanyak 7 responden atau 23% yang menjawab setuju dengan skor 28, sehingga total skor item 6 adalah 143 dan masuk dalam kategori sangat baik.

4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Partisipasi Masyarakat (X_2)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 6 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4. Tanggapan Responden
Variabel Partisipasi Masyarakat (X_2) pada Item 1-3**

Bobot	Tanggapan Responden								
	Item 1			Item 2			Item 3		
	Frek.	Skor	Persen	Frek.	Skor	Persen	Frek.	Skor	Persen
5	18	90	60	21	105	70	25	125	83
4	12	48	40	9	36	30	5	20	17
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	30	138	100	30	141	100	30	145	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel di atas dalam pernyataan masyarakat desa terlibat langsung secara aktif dalam pengambilan keputusan program dana desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 18 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju dengan skor 90, sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab setuju dengan skor 48, sehingga total skor item 1 adalah 138 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Untuk pernyataan tentang masyarakat terlibat langsung dalam pengusulan rencana anggaran diperoleh tanggapan responden sebanyak 21 responden atau 70% yang menjawab sangat setuju dengan skor 105, sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 36, sehingga total skor item 2 adalah 141 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Untuk pernyataan tentang masyarakat terlibat secara aktif dalam rapat paripurna diperoleh tanggapan responden sebanyak 25 responden atau 83% yang menjawab sangat setuju dengan skor 125, sebanyak 5 responden atau 17% yang menjawab setuju dengan skor 20, sehingga total skor item 3 adalah 145 dan masuk dalam kategori sangat baik.

**Tabel 4.5. Tanggapan Responden
Variabel Partisipasi Masyarakat (X_2) pada Item 4-6**

Jumlah	30	147	100	30	142	100	30	143	100
--------	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang masyarakat desa terlibat langsung secara aktif mengawasi dan melaporkan pengelolaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 27 responden atau 90% yang menjawab sangat setuju dengan skor 135, sebanyak 3 responden atau 10% yang menjawab setuju dengan skor 12, sehingga total skor item 4 adalah 147 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Untuk pernyataan tentang masyarakat secara aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran diperoleh tanggapan responden sebanyak 22 responden atau 73% yang menjawab sangat setuju dengan skor 110, sebanyak 8 responden atau 27% yang menjawab setuju dengan skor 32, sehingga total skor item 5 adalah 142 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang masyarakat memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 23 responden atau 77% yang menjawab sangat setuju dengan skor 115, sebanyak 7 responden atau 23% yang menjawab setuju dengan skor 28, sehingga total skor item 6 adalah 143 dan masuk dalam kategori sangat baik.

4.2.3. Analisis Deskriptif Variabel Ketaatan Pelaporan (X_3)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 4 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6. Tanggapan Responden
Variabel Ketaatan Pelaporan (X_3) pada Item 1-4**

Bobot	Tanggapan Responden											
	Item 1			Item 2			Item 3			Item 4		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	25	125	83	19	95	63	19	95	63	14	70	47
4	5	20	17	11	44	37	11	44	37	16	64	53
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	30	145	100	30	139	100	30	139	100	30	134	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel di atas dalam pernyataan transparansi pengelolaan keuangan dana desa dapat mengakomodasi usulan/suara rakyat diperoleh tanggapan responden sebanyak 25 responden atau 83% yang menjawab sangat setuju dengan skor 125, sebanyak 5 responden atau 17% yang menjawab setuju dengan skor 20, sehingga total skor item 1 adalah 145 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Untuk pernyataan tentang rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 19

responden atau 63% yang menjawab sangat setuju dengan skor 95, sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab setuju dengan skor 44, sehingga total skor item 2 adalah 139 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Untuk pernyataan tentang masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 19 responden atau 63% yang menjawab sangat setuju dengan skor 95, sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab setuju dengan skor 44, sehingga total skor item 3 adalah 139 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Untuk pernyataan tentang pengelolaan dana desa di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut sehingga terciptanya tertib administrasi dan peraturan diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 16 responden atau 53% yang menjawab setuju dengan skor 64, sehingga total skor item 4 adalah 134 dan masuk dalam kategori sangat baik.

4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 5 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Pendapat responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7. Tanggapan Responden
Variabel Pengelolaan Dana Desa pada Item 1 – 2

Bobot	Tanggapan Responden					
	Item 1			Item 2		
	Frekuensi	Skor	Persen	Frekuensi	Skor	Persen
5	29	145	97	28	140	93
4	1	4	3	2	8	7
3	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
Jumlah	30	149	100	30	148	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel di atas dalam pernyataan tentang Pemerintah Desa selalu menyampaikan informasi tentang capaian dari program dana desa yang telah ditargetkan diperoleh tanggapan responden sebanyak 29 responden atau 97% yang menjawab sangat setuju dengan skor 145, sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab setuju dengan skor 4, sehingga total skor item 1 adalah 149 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Untuk pernyataan tentang Pemerintah Desa selalu tepat waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 28 responden atau 93% yang menjawab sangat setuju dengan skor 140, sebanyak 2 responden atau 7% yang menjawab setuju dengan skor 8, sehingga total skor item 2 adalah 148 dan masuk dalam kategori sangat baik.

**Tabel 4.8. Tanggapan Responden
Variabel Pengelolaan Dana Desa pada Item 3 – 5**

Bobot	Tanggapan Responden								
	Item 3			Item 4			Item 5		
	Frek.	Skor	Persen	Frek.	Skor	Persen	Frek.	Skor	Persen
5	24	120	29	19	95	63	22	110	73
4	6	24	20	11	44	37	8	32	27
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	30	144	100	30	139	100	30	142	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang Pemerintah Desa melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sesuai dengan prosedur yang berlaku diperoleh tanggapan responden sebanyak 24 responden atau 29% yang menjawab sangat setuju dengan skor 120, sebanyak 6 responden atau 20% yang menjawab setuju dengan skor 24, sehingga total skor item 3 adalah 144 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Untuk pernyataan tentang Pemerintah Desa selalu memperoleh kecukupan informasi tentang pertanggungjawaban pengelolaan dana desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 19 responden atau 63% yang menjawab sangat setuju dengan

skor 95, sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab setuju dengan skor 44, sehingga total skor item 4 adalah 139 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan tabel di atas dalam pernyataan tentang Pemerintah Desa selalu melaporkan pertanggungjawabannya tepat waktu diperoleh diperoleh tanggapan responden sebanyak 22 responden atau 73% yang menjawab sangat setuju dengan skor 110, sebanyak 8 responden atau 27% yang menjawab setuju dengan skor 32, sehingga total skor item 5 adalah 142 dan masuk dalam kategori sangat baik.

4.3. Pengujian Hipotesis

4.3.1. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda untuk memprediksi apakah faktor Kompetensi Aparat (X1), Partisipasi Masyarakat (X2) dan Ketaatan Pelaporan (X3) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Analisis ini menggunakan data berdasarkan kuisioner yang dibagikan. Perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS-16. Adapun hasil dari perhitungan analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	3.061	3.398	
Kompetensi Aparat	.742	.088	.849
Partisipasi Masyarakat	-.045	.068	-.067
Ketaatan Pelaporan	.054	.099	.055

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Olahan Data SPSS-16 tahun 2023

Dari hasil olahan data SPSS maka diperoleh persamaan regresi berganda berikut

$$: Y = 3,061 + 0,742X_1 - 0,045X_2 + 0,054X_3 + \epsilon$$

Berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda di atas, maka dapat diketahui bahwa angka konstanta sebesar 3,061 yang artinya bahwa angka Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar 3,061 apabila variabel yang lain bernilai 0. Koefisien regresi Kompetensi Aparat (b_1) sebesar 0,742 yang artinya bahwa setiap perubahan variabel Kompetensi Aparat (b_1) akan diikuti oleh perubahan Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar 0,742 dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Koefisien regresi Partisipasi Masyarakat (b_2) sebesar -0,045 yang artinya bahwa setiap perubahan variabel Partisipasi Masyarakat (b_2) akan diikuti oleh perubahan Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar -0,045 dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Koefisien

regresi Ketaatan Pelaporan (b_3) sebesar 0,054 yang artinya bahwa setiap perubahan variabel Ketaatan Pelaporan (b_3) akan diikuti oleh perubahan Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar 0,054 dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Sedangkan untuk melihat variasi naik turunnya variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) dapat diketahui pada tabel koefisien determinasi (R^2) berikut :

Tabel 4.10
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.859 ^a	.738	.708	.665

a. Predictors: (Constant), Ketaatan Pelaporan, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat

Sumber : Olahan Data SPSS-16 tahun 2023

Berdasarkan pada tabel 4.10 Model Summary diatas, maka dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,738 atau 73,8%, yang berarti bahwa 73,8% variasi naik turunnya variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) mampu dijelaskan oleh variabel Kompetensi Aparat (X1), Partisipasi Masyarakat (X2) dan Ketaatan Pelaporan (X3), namun sisanya sebesar 26,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.3.2. Uji Parsial (Uji t)

Secara parsial, variabel Kompetensi Aparat (X1), Partisipasi Masyarakat (X2) dan Ketaatan Pelaporan (X3) pada Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato menggunakan uji t, jika

dibandingkan nilai t_{tabel} dengan nilai t_{hitung} pada taraf signifikan 0,05 dengan nilai df sebesar $n - k - 1 = 30 - 3 - 1 = 26$, maka diperoleh df sebesar 26 dan untuk nilai t_{tabel} sebesar 2,056. Selain itu, uji signifikan dapat dilihat dari nilai signifikansi koefisien regresi. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan (5% atau 0,05) maka hipotesis penelitian tersebut dapat diterima, dan jika sebaliknya nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 maka hipotesis ditolak. Adapun hasil perhitungan regresi berganda untuk uji t atau uji parsial berdasarkan tabel berikut adalah :

**Tabel 4.11. Uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.061	3.398		.901	.376
Kompetensi Aparat	.742	.088	.849	8.418	.000
Partisipasi Masyarakat	-.045	.068	-.067	-.664	.512
Ketaatan Pelaporan	.054	.099	.055	.541	.593

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Olahan Data SPSS16 tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 8,418 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,056 ($t_{hitung} 8,418 > t_{tabel} 2,056$). Yang berarti bahwa variabel Kompetensi Aparat (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat

Kabupaten Pohuwato dan didukung dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% ($0,000 < 0,05$).

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,664 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,056 ($t_{hitung} -0,664 > t_{tabel} 2,056$) dengan nilai signifikan $0,035 < 0,05$ atau 5% ($0,035 < 0,05$) yang berarti bahwa variabel Partisipasi Masyarakat (X₂) berpengaruh negatif terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,541 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,056 ($t_{hitung} 0,541 < t_{tabel} 2,056$). Yang berarti bahwa variabel Ketaatan Pelaporan (X₃) berpengaruh positif dan namun tidak signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Demikian pula halnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,593 yang lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% ($0,593 > 0,05$).

4.3.3. Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji simultan atau uji F dilakukan dalam penelitian ini dengan maksud untuk melihat pengaruh variabel Kompetensi Aparat (X₁), Partisipasi Masyarakat (X₂) dan Ketaatan Pelaporan (X₃) terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan 50 responden sekaligus sebagai sampel. Dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikansi dengan taraf $\alpha = 5\%$.

Tabel 4.12. Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	32.376	3	10.792	24.420	.000 ^a
Residual	11.490	26	.442		
Total	43.867	29			

a. Predictors: (Constant), Ketaatan Pelaporan, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Olahan Data SPSS16 tahun 2023

Hasil olahan data dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh F_{hitung} sebesar $24.420 > F_{tabel}$ sebesar 2,975 dengan probabilitas terjadinya kesalahan F_{hitung} lebih kecil dari taraf (α) kesalahan yang ditentukan $0,000 < 0,005$. Dengan demikian variabel Kompetensi Aparat (X1), Partisipasi Masyarakat (X2) dan Ketaatan Pelaporan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan berikut :

1. Kompetensi Aparat berpengaruh positif dan signifikan secara parsial sebesar 8,418 (t_{hitung} 8,418 > t_{tabel} 2,056) terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
2. Partisipasi masyarakat berpengaruh negatif secara parsial sebesar -0.664 (t_{hitung} -0.664 > t_{tabel} 2,056) terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
3. Ketaatan pelaporan berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial sebesar 0,541 (t_{hitung} 0,541 < t_{tabel} 2,056) terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
4. Kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan ketaatan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan sebesar 24,420 (F_{hitung} 24,420 > F_{tabel} 2,975) terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

5.2. Saran-Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menyajikan saran-saran sebagai masukan yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato agar terus mempertahankan Kompetensi Aparat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa karena diperoleh hasil penelitian bahwa Kompetensi Aparat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
2. Disarankan kepada Pemerintah Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato agar dapat melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa tidak melibatkan Masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini penting terutama dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan citra Pemerintah Desa.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato agar terus memperbaiki dan meningkatkan Ketaatan Pelaporan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa karena diperoleh hasil penelitian bahwa Ketaatan Pelaporan secara parsial berpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain selain variabel tersebut diatas yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, misalnya pengawasan, fungsi BPD dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat & Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Arfan, I Lubis, 2010, ‘*Akuntansi Keperilakuan*’, Edisi dua, Salemba Empat: Jakarta
- A.W. Widjaja. 2003, *Otonomi Desa*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.
- Dadang Julianara. (2002). *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Devas, Nick., dan Grant, Ursula. 2003. *Local Government Decision Making-Citizen Participation & Local Accountability: Some Evidence From Kenya and Uganda*. *Public Administration and Developmen*. Vol.23, Page 307-306.
- Frink, D. D. dan Klimoski, R. J., 2004. “*Advancing accountability theory and practice: Introduction to the human resource management review special edition*”. *Human Resource Management Review* 14 (2004) 1-17
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit ERLANGGA
- Herlianto, D. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta : Gosyen Publishing
- Hevesi, G. Alan. 2005. *Standards for Internal Control in New York State Government*. Diunduh dari:www.osc.state.ny.us
- Ibrahim, Y. (2003). *Studi Kelayakan Bisnis*. Rineka Cipta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (SAK ETAP)*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
- Lapenanda. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Buku I. Penerbit Bmbooks

- Mada, Syarifudin, Linjte Kelangi & Hendrik Gamaliel. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo.*
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2010. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mowday, Richard T et al., 1979. *The Measurement of Organizational Commitment*. Journal of Vocational Behaviour, Vol. 14: Pp 224-247
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014."*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*".Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- _____ Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- _____, Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta : PT raja Grafindo Persada.
- Yayuk Yulianti. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.

Lampiran 1

JADWAL PENELITIAN

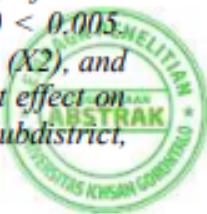
Kegiatan	Tahun 2021/2022									
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep
Observasi										
Usulan Judul										
Penyusunan Proposal & Bimbingan										
Ujian Proposal										
Revisi Proposal										
Pengolahan Data & Bimbingan										
Ujian Skripsi										
Revisi Skripsi										

ABSTRACT

FADLUN TULI. E2119174. FACTORS AFFECTING VILLAGE FUND MANAGEMENT IN BUTUNGALE VILLAGE, WEST POPAYATO SUBDISTRICT, POHUVATO DISTRICT

Village fund management is an activity that includes planning, implementation, administration, reporting, accountability, and guidance and supervision of Village Funds. This research aims to find and analyze the effect of the internal control system on Village Fund Management in BUTUNGALE Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District. Based on the data processing results using SPSS-16, a t-count value of 2.056 can be obtained ($t\text{-count } 8.418 > t\text{-table } 2.056$). It means that the Official Competence variable (X_1) has a positive and significant effect on Village Fund Management (Y) in Butungale Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District, and by a significant value of 0.000, which is smaller than the significance level used, namely 0.05 or 5% ($0.000 < 0.05$). The t-count value of -0.664 is smaller when compared to the t-table value of 2.056 ($t\text{-count } -0.664 > t\text{-table } 2.056$) with a significant value of $0.035 < 0.05$ or 5% ($0.035 < 0.05$) which means that the Community Participation variable (X_2) does not affect Village Fund Management (Y) in Butungale Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District. The t-count value of 0.541 is smaller than the t-table value of 2.056 ($t\text{-count } 0.541 < t\text{-table } 2.056$). It means that the Reporting Compliance variable (X_3) has a positive but not significant effect on Village Fund Management (Y) in Butungale Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District. Likewise, a significance value of 0.593 is obtained greater than the significance level used, namely 0.05 or 5% ($0.593 > 0.05$). Meanwhile, the F-count is $24,420 > F\text{-table is } 2.975$, with the probability of an F-count error occurring smaller than the specified error level (α) of $0.000 < 0.005$. Thus, the variables of Official Competence (X_1), Community Participation (X_2), and Reporting Compliance (X_3) simultaneously have a positive and significant effect on Village Fund Management (Y) in Butungale Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District.

Keywords: official competence, community participation, reporting compliance, village fund management



ABSTRAK

FADLUN TULI. E2119174. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUTUNGALE KECAMATAN POPAYATO BARAT KABUPATEN POHUWATO

Pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan serta pengawasan Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh sistem pengendalian internal Pengelolaan Dana Desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato. Dari hasil olahan data, dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,056 ($t_{hitung} = 8,418 > t_{tabel} = 2,056$). Yang berarti bahwa variabel Kompetensi Aparat (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato dan didukung dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% ($0,000 < 0,05$). Nilai t_{hitung} sebesar -0,664 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,056 ($t_{hitung} = -0,664 > t_{tabel} = 2,056$) dengan nilai signifikan $0,035 < 0,05$ atau 5% ($0,035 < 0,05$) yang berarti bahwa variabel Partisipasi Masyarakat (X₂) tidak mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Nilai t_{hitung} sebesar 0,541 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,056 ($t_{hitung} = 0,541 < t_{tabel} = 2,056$). Yang berarti bahwa variabel Ketaatan Pelaporan (X₃) berpengaruh positif dan namun tidak signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Demikian pula halnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,593 yang lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% ($0,593 > 0,05$). Sedangkan F_{hitung} sebesar $24,420 > F_{tabel}$ sebesar 2,975 dengan probabilitas terjadinya kesalahan F_{hitung} lebih kecil dari taraf (α) kesalahan yang ditentukan $0,000 < 0,005$. Dengan demikian variabel Kompetensi Aparat (X₁), Partisipasi Masyarakat (X₂) dan Ketaatan Pelaporan (X₃) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

Kata kunci: kompetensi aparat, partisipasi masyarakat, ketaatan pelaporan, pengelolaan dana desa

KUISIONER

Dalam rangka penyusunan skripsi mengenai “Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato,” maka penulis memohon bantuan Bapak/ Ibu / Saudara/ I untuk meluangkan sedikit waktu mengisi daftar pertanyaan di bawah ini. Mengenai identitas Bapak/ Ibu/ Saudara/ I kami jamin kerahasiaannya.

Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang Bapak/ Ibu/ Saudara/I berikan.

Hormat Saya,

**Fadlun Tuli
NIM E21.19.174**

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Pilihlah pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberikan tanda (✓) pada kolom yang tersedia. Adapun makna tanda tersebut adalah :

5	Sangat Setuju	(SS)
4	Setuju	(S)
3	Kurang Setuju	(KS)
2	Tidak Setuju	(TS)
1	Sangat Tidak Setuju	(STS)

A. PENGELOLAAN DANA DESA (Y)

No	Pernyataan Indikator	SS	S	KS	TS	STS
1	Pemerintah Desa selalu menyampaikan informasi tentang capaian dari program dana desa yang telah ditargetkan					
2	Pemerintah Desa selalu tepat waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa					
3	Pemerintah Desa melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sesuai dengan prosedur yang berlaku.					
4	Pemerintah Desa selalu memperoleh kecukupan informasi tentang pertanggungjawaban pengelolaan dana desa					
5	Pemerintah Desa selalu melaporkan pertanggungjawabannya tepat waktu					

B. KOMPETENSI APARAT (X₁)

No	Pernyataan Indikator Kompetensi Aparat	SS	S	KS	TS	STS
1	Pengetahuan akan siklus pengelolaan dana desa menunjang kemampuan dalam bekerja					
2	Pelatihan terkait dengan penyusunan laporan keuangan berguna untuk mengembangkan kemampuan aparatur desa					
3	Keahlian teknis merupakan bagian yang sangat menunjang dalam pengelolaan dana desa					
4	Kemampuan mencari solusi merupakan kompetensi yang akan menunjang pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.					
5	Inisiatif dalam mengelola keuangan desa harus dimiliki oleh setiap aparat.					
6	Pelayanan kepada masyarakat diberikan dengan penuh keramahan dan kesopanan					

C. PARTISIPASI MASYARAKAT (X₂)

No	Pernyataan Indikator Akuntabel	SS	S	KS	TS	STS
1	Masyarakat desa terlibat langsung secara aktif dalam pengambilan keputusan program dana desa					
2	Masyarakat terlibat langsung dalam pengusulan rencana anggaran					
3	Masyarakat terlibat secara aktif dalam rapat paripurna.					
4	Masyarakat desa terlibat langsung secara					

	aktif mengawasi dan melaporkan pengelolaan anggaran desa.					
5	Masyarakat secara aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran					
6	Masyarakat memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran desa.					

D. KETAATAN PELAPORAN (X₃)

No	Pernyataan Indikator Ketaatan Pelaporan	SS	S	KS	TS	STS
1	Transparansi pengelolaan keuangan dana desa dapat mengakomodasi usulan-suara rakyat					
2	Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan					
3	Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa					
4	Pengelolaan dana desa di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut sehingga terciptanya tertib administrasi dan peraturan					

Lampiran 3

TABULASI DATA

N	Pengelolaan Dana Desa (Y)					Jml
	1	2	3	4	5	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	4	24
3	5	5	5	5	5	25
4	5	5	4	4	5	23
5	5	5	5	4	5	24
6	5	5	5	4	5	24
7	5	5	5	5	4	24
8	5	4	4	4	5	22
9	5	5	5	5	5	25
10	5	5	5	5	5	25
11	5	5	5	5	5	25
12	5	5	5	5	5	25
13	5	5	5	4	5	24
14	5	5	5	4	4	23
15	5	5	4	5	4	23
16	5	5	5	5	5	25
17	5	5	5	5	5	25
18	5	5	5	5	5	25
19	5	5	5	4	5	24
20	5	5	5	4	5	24
21	5	5	5	5	5	25
22	5	5	5	5	5	25
23	5	5	4	4	4	22
24	5	5	5	4	4	23
25	5	5	5	5	5	25
26	4	4	4	4	4	20
27	5	5	4	5	4	23
28	5	5	5	5	5	25
29	5	5	5	5	5	25
30	5	5	5	5	5	25

Z	Kompetensi Aparat (X1)	Jml -
---	------------------------	-------

	1	2	3	4	5	6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	4	4	5	28
3	5	5	5	5	5	5	30
4	4	5	5	4	4	5	27
5	5	5	5	5	4	4	28
6	5	5	5	5	4	4	28
7	5	4	5	5	5	5	29
8	5	5	4	5	4	4	27
9	5	5	5	5	5	5	30
10	5	5	5	4	5	5	29
11	5	5	5	5	5	5	30
12	5	5	5	5	5	5	30
13	4	5	5	5	5	5	29
14	4	4	5	5	5	5	28
15	5	4	4	5	5	4	27
16	5	5	5	5	4	5	29
17	5	5	5	5	5	5	30
18	4	5	5	5	5	5	29
19	4	5	5	5	4	5	28
20	4	4	5	5	5	5	28
21	4	5	5	5	5	5	29
22	4	4	5	5	5	5	28
23	4	4	4	5	4	4	25
24	4	4	4	5	5	4	26
25	5	5	5	5	5	5	30
26	4	4	4	5	5	4	26
27	4	4	5	5	5	5	28
28	5	5	5	5	5	5	30
29	5	5	5	5	5	5	30
30	5	5	5	5	5	5	30

	1	2	3	4	5	6	
1	5	4	5	4	5	5	28
2	4	4	4	4	4	4	24
3	5	4	4	4	4	4	25
4	5	4	4	4	3	4	24
5	5	4	4	5	4	4	26
6	5	4	4	4	5	4	26
7	4	4	4	4	4	4	24
8	5	5	4	4	4	5	27
9	4	4	5	4	2	4	23
10	4	4	4	5	4	4	25
11	4	5	5	4	4	4	26
12	5	4	4	4	3	4	24
13	4	4	5	4	4	4	25
14	5	4	4	4	5	5	27
15	5	4	5	5	2	4	25
16	5	4	5	5	4	4	27
17	5	5	4	4	3	4	25
18	5	5	5	5	5	5	30
19	5	4	4	5	2	4	24
20	4	5	4	4	3	4	24
21	5	4	4	3	4	4	24
22	5	5	5	4	5	4	28
23	5	4	5	5	4	3	26
24	5	4	5	5	2	4	25
25	5	5	4	4	4	5	27
26	5	4	5	5	5	3	27
27	5	5	5	5	5	5	30
28	5	5	5	5	5	4	29
29	5	4	5	5	2	4	25
30	5	5	4	4	3	5	26

Z	Ketaatan Pelaporan (X3)				Jml
	1	2	3	4	
1	5	5	5	5	20
2	5	5	4	4	18
3	5	5	5	5	20
4	5	4	5	5	19
5	5	4	5	5	19
6	5	4	5	4	18
7	5	5	5	5	20
8	5	5	5	5	20
9	5	5	5	4	19
10	4	4	5	4	17
11	5	5	5	4	19
12	4	4	4	4	16
13	5	5	4	4	18
14	4	4	4	4	16
15	5	5	4	4	18
16	5	5	5	5	20
17	5	4	5	4	18
18	5	5	5	5	20
19	5	5	5	4	19
20	5	4	5	5	19
21	5	5	5	5	20
22	4	4	4	5	17
23	5	5	4	4	18
24	5	5	5	4	19
25	5	5	5	5	20
26	4	4	4	5	17
27	5	5	5	5	20
28	5	4	4	4	17
29	5	5	4	4	18
30	5	5	4	4	18

Lampiran 4

OUTPUT REGRESSION

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.859 ^a	.738	.708	.665

a. Predictors: (Constant), Ketaatan Pelaporan, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32.376	3	10.792	24.420	.000 ^a
	Residual	11.490	26	.442		
	Total	43.867	29			

a. Predictors: (Constant), Ketaatan Pelaporan, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3.061	3.398		.901	.376
	Kompetensi Aparat	.742	.088	.849	8.418	.000
	Partisipasi Masyarakat	-.045	.068	-.067	-.664	.512
	Ketaatan Pelaporan	.054	.099	.055	.541	.593

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Lampiran 5

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail:lembagapenelitian@unisan.ac.id

No.: 084/PIP/LEMLIT-UNISAN/XII/2022

Lampiran :

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada YTH.

Kepala Desa Butungale

Di

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Fadlun Tuli
NIM : E2119114
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Manajemen
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Butungale
Judul penelitian : Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Desa Butungale Kecamatan popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Lampiran 6

SURAT BALASAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO KECAMATAN POPAYATO BARAT DESA BUTUNGALE

Alamat : Jl. Daerah Marata Dusun Mekar No. ... Desa Butungale Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato 96267

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 140 / BTN - 161 / IV / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: SAM'UN YALANG.SP
Jabatan	: Kepala Desa Butungale
Alamat	: Desa Butungale Kec.Popayato Barat Kab. Pohuwato

Dengan ini Menerima Dan Memberikan izin untuk pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal skripsi kepada :

Nama	: Fadlun tuli
Tempat/Tanggal Lahir	: Dudewulo, 19 September 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nim	: E2119174
Program Studi	: Manajemen
Lokasi	: Kantor Desa Butungale Kec.Popayato Barat
Judul Penelitian	: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Butungale 23 April 2023

Kepala Desa Butungale



Lampiran 7

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 174/SRP/FE-UNISAN/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 092811690103
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Fadlun Tuli
NIM : E2119174
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Butungale Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 8%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya



Gorontalo, 18 September 2023
Tim Verifikasi,


Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir :Hasil Pengecekan Turnitin

Lampiran 8

HASIL TURNITIN

 Similarity Report ID: oid:25211:38537098

PAPER NAME	AUTHOR
FILE TURNITIN FADLUN TULI.docx	Fadlun Tuli
<hr/>	
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
10359 Words	67609 Characters
<hr/>	
PAGE COUNT	FILE SIZE
68 Pages	202.2KB
<hr/>	
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Jul 4, 2023 2:10 PM GMT+8	Jul 4, 2023 2:11 PM GMT+8

● 8% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 7% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)



Similarity Report ID: oid:25211:38537098

● 8% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 7% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	journal.stieamkop.ac.id	1%
	Internet	
2	eprints.polsri.ac.id	<1%
	Internet	
3	eprintslib.ummggl.ac.id	<1%
	Internet	
4	repository.ung.ac.id	<1%
	Internet	
5	fikom-unisan.ac.id	<1%
	Internet	
6	repository.unibos.ac.id	<1%
	Internet	
7	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
8	poltekanika.ac.id	<1%
	Internet	



Similarity Report ID: oid:25211:38537098

- | | | |
|----|--|---------------|
| 9 | ecampus.iainbatusangkar.ac.id | <1% |
| | Internet | |
| 10 | scribd.com | <1% |
| | Internet | |
| 11 | LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16 | <1% |
| | Submitted works | |
| 12 | LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-16 | <1% |
| | Submitted works | |
| 13 | repository.utp.ac.id | <1% |
| | Internet | |

Lampiran 9

CURRICULUM VITAE

1. Identritas Pribadi



Nama	:	Fadlun Tuli
NIM	:	E2119174
Tempat/TglLahir	:	Dudewulo, 19 September 1997
JenisKelamin	:	Perempuan
Angkatan	:	2019
Fakultas	:	Ekonomi
Jurusan	:	Manajemen
Konsentrasi	:	Keuangan
Alamat	:	Desa Butungale, Kec. Popayato Barat Kabupaten Pohuwato

2. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. Menyelesaikan belajar di SDN 06 Popayato Barat pada tahun 2009
2. Kemudian melanjutkan kejenjang berikutnya di MTs ALKHAIRAAAT Dudewulo dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2012
3. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan SLTA dengan mengambil Paket C pada tahun 2018
4. Melanjutkan Pendidikan Tinggi di UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO, Mengambil Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi.